



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Rabu

Tanggal: 03 Mei 2017

Halaman: 10

AKURASI DATA PENDUDUK JELANG PILEG DAN PILPRES

YOGYA (KR) - Kendati pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) masih akan berlangsung tahun 2019 mendatang, namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Yogya mulai melakukan persiapan. Salah satunya mematangkan program layanan jemput bola kependudukan yang akan digencarkan mulai tahun depan.

"Programnya sedang kami susun. Yang jelas, begitu masuk tahun 2018 maka petugas akan lebih banyak ke lapangan untuk jemput bola kependudukan," urai Kepala Dindukcapil Kota Yogya Sisruwadi usai rapat kerja dengan jajaran Komisi A DPRD Kota Yogya, Selasa (2/5).

Sasaran utama layanan jemput bola kependudukan tersebut ialah warga yang tinggal dan menetap di Kota Yogya namun belum masuk dalam data base. Di antaranya anak atau remaja usia di bawah 17 tahun, penduduk rentan dan penduduk nonpermanen.

Khusus bagi anak usia di bawah 17 tahun, Dindukcapil akan memaksimalkan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA). "Tahun ini sebenarnya sudah ada layanan jemput bola KIA yang masuk ke sekolah-sekolah jenjang SMA. Tapi tahun depan intensitasnya akan ditingkatkan supaya semua terdata. Siswa jenjang SMA kan tahun 2019 mendatang sudah memiliki hak pilih," imbuhnya.

Sedangkan penduduk rentan, menurut Sisruwadi akan difokuskan pada orang terlantar yang bakal diterbitkan Surat Keterangan Orang Terlantar (SKOT). Penduduk rentan tersebut biasanya tinggal dan menetap di panti asuhan atau rumah singgah. Diprediksi, masih banyak penduduk rentan yang belum didaftarkan dalam data kependudukan.

Oleh karena itu, pengasuh rumah singgah atau panti asuhan akan didatangi untuk mendata warga asuhannya secara faktual. Penduduk rentan yang mengantongi SKOT, selanjutnya akan dipantau dalam jangka waktu satu tahun ke depan. "Jika dalam setahun ini masih menetap di Kota Yogya maka bisa kami masukkan dalam data kependudukan. Kepala Keluarga (KK) nya mengundang pada pengasuh atau penanggung jawab rumah singgah maupun panti asuhan," jelasnya.

Sementara penduduk nonpermanen, pada tahun ini juga sudah dilakukan pendataan. Yakni penduduk luar daerah yang tinggal di Kota Yogya namun tidak mengurus dokumen mutasi kependudukan. Seharusnya, penduduk yang sudah menetap di Kota Yogya selama enam bulan, harus mengurus dokumen mutasi. Namun hal itu kerap diabaikan lantaran tidak ada sanksi yang dikenakan.

"Yang terpenting, semua penduduk yang tinggal dan menetap di Kota Yogya masuk dalam data base kependudukan. Dengan masuk dalam data kependudukan, maka yang bersangkutan memiliki hak pilih. Sehingga data pemilih dalam Pileg dan Pilpres 2019 akan jauh lebih baik," papar Sisruwadi.

(Dhi)-o

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005